

Frequently Asked Questions (FAQ) WBS – *updated 2026*

Whistleblowing System (WBS)

1. Apa yang dimaksud dengan Whistleblowing System (WBS) Kementerian Desa dan PDT?

Whistleblowing System (WBS) Kementerian Desa dan PDT adalah sarana pelaporan yang disediakan oleh Kementerian Desa dan PDT untuk menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran atau perbuatan yang berindikasi *fraud* yang terjadi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Siapa yang dapat menyampaikan laporan melalui WBS Kementerian Desa dan PDT?

WBS dapat digunakan oleh pegawai internal maupun masyarakat yang mengetahui, melihat, atau memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Kementerian Desa dan PDT.

3. Pelanggaran apa saja yang dapat dilaporkan melalui WBS Kementerian Desa dan PDT?

Laporan pengaduan yang dapat disampaikan antara lain dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, suap atau gratifikasi, pemerasan, pelanggaran kode etik, penyalahgunaan BMN serta bentuk pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan Kementerian Desa dan PDT.

4. Siapa saja yang dapat dilaporkan melalui WBS Kementerian Desa dan PDT?

WBS dapat digunakan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai (PNS, PPPK, Tenaga Pendamping Profesional) dan pejabat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan Kementerian Desa dan PDT.

5. Apakah Saya harus mencantumkan nama dan identitas pribadi saat membuat laporan?

Tidak. Pelapor diimbau untuk tidak mencantumkan identitas pribadi dalam laporan. Pelapor dapat membuat akun anonim pada aplikasi WBS untuk berkomunikasi dan memantau perkembangan laporan tanpa mengungkapkan identitas pribadi. Kerahasiaan identitas pelapor merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan WBS.

6. Informasi apa yang sebaiknya dicantumkan dalam laporan?

Sampaikan informasi secara jelas dan lengkap, antara lain **apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan dan di mana kejadian terjadi, bagaimana kejadian** tersebut

dilakukan, serta informasi atau **bukti pendukung** yang dimiliki. Semakin lengkap informasi yang diberikan, semakin mudah laporan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.

7. **Apakah setiap laporan yang masuk pasti ditindaklanjuti?**

Laporan akan terlebih dahulu **ditelaah berdasarkan informasi yang disampaikan** untuk menentukan apakah laporan memenuhi kriteria dari segi kecukupan informasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan lebih lanjut.

8. **Bagaimana jika informasi dalam laporan yang Saya kirim belum cukup?**

Apabila diperlukan informasi atau bukti tambahan, pelapor akan diminta untuk melengkapinya melalui fitur komunikasi yang tersedia pada WBS. Pelapor diharapkan memberikan respons dan bukti pendukung tambahan apabila diminta, agar proses penanganan laporan dapat berjalan secara optimal.

9. **Apakah Saya dapat mengetahui perkembangan laporan pengaduan yang sudah dikirim?**

Ya. Pelapor dapat memantau perkembangan laporan melalui akun yang digunakan saat menyampaikan laporan. Karena itu, pelapor disarankan untuk secara berkala memeriksa akun WBS dan memperhatikan setiap permintaan informasi atau bukti tambahan agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.

10. **Apakah laporan harus disertai bukti?**

Bukti pendukung sangat membantu dalam proses penelaahan, tetapi pelapor tidak perlu memaksakan diri memperoleh bukti yang tidak dimilikinya. Sampaikan informasi yang diketahui secara jujur dan selengkap mungkin, serta lampirkan bukti yang tersedia dan relevan.

11. **Apa yang harus diperhatikan agar laporan dapat ditindaklanjuti?**

Pastikan laporan disampaikan berdasarkan fakta atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan uraian yang jelas, lengkap, dan relevan serta dilengkapi bukti pendukung apabila tersedia. Setelah laporan disampaikan, pelapor juga perlu memantau perkembangan laporan dan memberikan respons apabila diperlukan informasi atau bukti tambahan.